

Analisis Perspektif Perempuan Dalam Kebijakan Lingkungan Di Indonesia

Ane Permatasari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*anepermatasari@umy.ac.id

Alamat: Jl. Ring Road Selatan, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi penulis: *anepermatasari@umy.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze women's perspectives on environmental policies in Indonesia and to identify the extent to which these perspectives have been accommodated in various regulations and policy implementations. Given that women play a strategic role in natural resource management and experience the impacts of environmental change differently from men, the inclusion of their perspectives is essential to achieving gender-just environmental policies. This research employs a qualitative approach using critical discourse analysis of national environmental policy documents, including the Law on Environmental Protection and Management, the National Strategic Policy on Gender Mainstreaming, and the National Medium-Term Development Plan documents. Data were also obtained through in-depth interviews with female environmental activists, academics, and policymakers. The findings reveal that although environmental policies in Indonesia have normatively recognized the importance of women's participation, in practice, women's perspectives remain marginalized and are not yet a primary consideration in policy formulation. Several contributing factors include the dominance of technocratic masculine narratives, weak gender-sensitive public participation mechanisms, and persistent cultural biases within institutions. This study recommends the need for policy reform that explicitly integrates women's perspectives, strengthening institutional capacity in gender mainstreaming, and expanding equitable public participation spaces for women at all stages of environmental policymaking.*

Keywords: *Women's Perspectives; Environmental Policy; Gender Justice; Public Participation; Indonesia.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif perempuan dalam kebijakan lingkungan di Indonesia, serta mengidentifikasi sejauh mana perspektif tersebut telah diakomodasi dalam berbagai regulasi dan implementasi kebijakan. Mengingat perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan menghadapi dampak perubahan lingkungan secara berbeda dibanding laki-laki, maka keterlibatan perspektif mereka menjadi keniscayaan dalam mewujudkan kebijakan lingkungan yang berkeadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis terhadap dokumen kebijakan lingkungan nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebijakan Strategis Nasional tentang Pengarusutamaan Gender, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para aktivis lingkungan perempuan, akademisi, dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan lingkungan di Indonesia telah mengakui pentingnya partisipasi perempuan, namun dalam praktiknya perspektif perempuan masih sering terpinggirkan dan belum menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan. Beberapa faktor penyebabnya antara

lain: dominasi narasi teknokratis yang maskulin, lemahnya mekanisme partisipasi publik yang sensitif gender, serta masih adanya bias budaya dalam kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif perempuan, penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan gender, serta peningkatan ruang partisipasi publik yang setara bagi perempuan dalam setiap tahapan kebijakan lingkungan.

Kata Kunci : Perspektif Perempuan, Kebijakan Lingkungan, Keadilan Gender, Partisipasi Publik, Indonesia.

1. Pendahuluan

Krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati telah menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas menghadapi kompleksitas pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga pendekatan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, perspektif perempuan menjadi sangat relevan mengingat peran strategis perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat rumah tangga dan komunitas. Perempuan di berbagai wilayah Indonesia diketahui berperan sebagai pengelola air, pengumpul kayu bakar, pengelola sampah rumah tangga, hingga penjaga ketahanan pangan keluarga, sehingga pengetahuan ekologis yang mereka miliki bersifat empiris dan kontekstual. Namun demikian, kendati secara normatif instrumen internasional seperti CEDAW dan SDGs serta kebijakan nasional tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) telah mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, implementasinya dalam kebijakan lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan.

Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan di sektor lingkungan masih rendah, sementara mekanisme partisipasi publik seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kerap kali tidak mampu mengakomodasi suara perempuan karena adanya bias struktural dan kultural. Akibatnya, kebijakan lingkungan yang dihasilkan cenderung mengabaikan kebutuhan dan kepentingan spesifik perempuan, serta gagal memanfaatkan pengetahuan lokal yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif perempuan terhadap kebijakan lingkungan di Indonesia, mengidentifikasi sejauh mana perspektif tersebut telah terakomodasi dalam kebijakan yang berlaku, serta menemukan faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi perempuan. Secara lebih spesifik, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) bagaimana

perspektif perempuan terhadap kebijakan lingkungan di Indonesia?; (2) sejauh mana perspektif perempuan terintegrasi dalam dokumen kebijakan lingkungan nasional?; (3) apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan? Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis dan studi kasus di beberapa wilayah yang mewakili keragaman ekologis Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kebijakan publik berperspektif gender serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan gender.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Ekofeminisme

Merupakan landasan paling fundamental dalam penelitian ini. Ekofeminisme, yang pertama kali diperkenalkan oleh Françoise d'Eaubonne pada tahun 1974, memandang bahwa terdapat hubungan konseptual, simbolik, dan linguistik antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam. Dalam perspektif ini, penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap lingkungan berasal dari logika dominasi yang sama, yaitu sistem patriarki yang hierarkis dan dualistik. Ekofeminisme membedakan beberapa aliran utama, yaitu ekofeminisme liberal yang menekankan pada partisipasi setara perempuan dalam pengelolaan lingkungan, ekofeminisme kultural yang menghargai hubungan khusus perempuan dengan alam berdasarkan pengalaman reproduktif dan perawatan, serta ekofeminisme sosialis yang mengkritik kapitalisme dan patriarki sebagai sistem yang saling terkait dalam mengeksploitasi perempuan dan alam. Dalam konteks penelitian ini, ekofeminisme digunakan sebagai lensa kritis untuk menganalisis bagaimana kebijakan lingkungan di Indonesia seringkali mereproduksi logika dominasi patriarkal yang mengabaikan pengetahuan dan kepentingan perempuan. Teori ini juga membantu mengungkap bahwa keterpinggiran perempuan dalam proses kebijakan bukanlah fenomena alamiah, melainkan konstruksi sosial yang dapat diubah melalui transformasi relasi kuasa.

2.2. Feminist Political Ecology (FPE)

Dikembangkan sebagai kritik dan perluasan dari political ecology tradisional yang dianggap kurang peka gender. FPE, yang dipelopori oleh Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, dan Esther Wangari pada tahun 1996, menekankan bahwa akses, kontrol, dan pengetahuan tentang sumber daya alam sangat ditentukan oleh relasi gender yang bersifat dinamis dan kontekstual. FPE memiliki tiga pilar utama. Pertama, pengetahuan berbasis gender (*Gendered Knowledge*), yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengetahuan ekologis yang berbeda karena pembagian kerja dan pengalaman yang berbeda dalam mengelola lingkungan. Kedua, akses dan kontrol berbasis gender (*gendered access and control*), yang menunjukkan bahwa meskipun perempuan mungkin memiliki akses terhadap sumber daya alam, kontrol terhadap sumber daya tersebut seringkali berada di tangan laki-laki. Ketiga, institusi dan aturan yang berbasis gender (*Gendered Institutions And Rules*), yang mengungkap bagaimana aturan formal dan informal dalam pengelolaan lingkungan seringkali bias gender. Dalam penelitian ini, FPE digunakan untuk menganalisis secara empiris bagaimana partisipasi perempuan dalam kebijakan lingkungan di Indonesia dibatasi oleh struktur akses dan kontrol yang timpang, serta bagaimana pengetahuan ekologis perempuan seringkali didevaluasi dalam forum-forum kebijakan yang didominasi oleh pendekatan teknokratis dan maskulin.

2.3. Kebijakan Publik Berperspektif Gender

Menjadi landasan ketiga yang penting dalam penelitian ini. Teori ini berakar pada konsep pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) yang diadopsi oleh PBB sejak Konferensi Perempuan di Beijing tahun 1995. Pengarusutamaan gender didefinisikan sebagai strategi untuk menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk dalam kebijakan lingkungan. Konsep ini kemudian dielaborasi oleh para ahli kebijakan seperti Caroline Moser dengan kerangka analisis triple role perempuan (peran reproduktif, produktif, dan pengelolaan komunitas) serta kebutuhan praktis gender (*Practical Gender Needs*) dan kebutuhan strategis gender (*Strategic Gender Needs*). Kebutuhan praktis gender berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dalam peran mereka yang sudah ada, sedangkan kebutuhan strategis gender berkaitan dengan transformasi relasi kuasa yang tidak setara antara laki-

laki dan perempuan. Dalam konteks kebijakan lingkungan, pendekatan ini menuntut bahwa setiap kebijakan harus dianalisis dampaknya secara diferensial terhadap laki-laki dan perempuan, serta harus menyediakan ruang partisipasi yang setara bagi kedua gender. Dalam penelitian ini, teori kebijakan publik berperspektif gender digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana dokumen-dokumen kebijakan lingkungan di Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara komitmen normatif pengarusutamaan gender dan implementasinya di lapangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multi-situs (*Multiple Case Study Design*). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perspektif, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh perempuan terhadap kebijakan lingkungan, serta untuk mengeksplorasi dinamika sosial, budaya, dan politik yang melingkupi partisipasi mereka. Desain studi kasus multi-situs dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap keragaman konteks lokal di Indonesia sekaligus mengidentifikasi pola-pola umum yang melintasi batas-batas wilayah. Pendekatan ini juga memungkinkan dilakukannya analisis komparatif antar kasus, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kaya dan mendalam dibandingkan dengan studi kasus tunggal.

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan Subjek Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di tiga provinsi yang dipilih secara purposif untuk mewakili keragaman geografis, ekologis, dan sosial-budaya Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat (mewakili wilayah padat penduduk dan urban), Provinsi Kalimantan Timur (mewakili wilayah dengan isu deforestasi dan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara), serta Provinsi Nusa Tenggara Timur (mewakili wilayah kering dengan isu ketahanan air dan pangan). Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Kriteria inklusi subjek penelitian meliputi: (1) perempuan yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan di wilayahnya; (2) perempuan yang terlibat dalam kegiatan komunitas atau organisasi yang berkaitan dengan lingkungan; (3)

perempuan pembuat kebijakan atau aparatur pemerintah di bidang lingkungan; serta (4) bersedia menjadi partisipan penelitian. Secara total, diperkirakan akan melibatkan 45-60 partisipan yang terdiri dari aktivis lingkungan perempuan, akademisi, petani, nelayan, pengelola sampah, serta pejabat perempuan di dinas lingkungan hidup.

3.2. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*In Depth Interview*) semi terstruktur yang akan dilakukan terhadap seluruh partisipan penelitian untuk menggali perspektif, pengalaman, pandangan, serta hambatan dan peluang yang mereka hadapi dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan. Wawancara akan direkam dan ditranskrip secara verbatim. Kedua, focus group discussion (FGD) yang akan dilaksanakan di setiap lokasi penelitian dengan melibatkan 6-8 peserta per kelompok. FGD bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan kolektif, norma sosial, serta dinamika relasi kuasa dalam komunitas yang mempengaruhi partisipasi perempuan. Ketiga, analisis dokumen (*Document Analysis*) yang akan dilakukan terhadap berbagai dokumen kebijakan lingkungan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait partisipasi publik, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta peraturan daerah tentang lingkungan hidup di masing-masing lokasi penelitian. Analisis dokumen juga akan mencakup laporan-laporan terkait pengarusutamaan gender dalam kebijakan lingkungan.

3.3. Teknik Analisis Data.

Analisis data akan dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tiga alur kegiatan: kondensasi data (*Data Condensation*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Teknik analisis utama yang digunakan adalah analisis tematik (*Thematic Analysis*) dengan pendekatan deduktif-induktif. Kerangka analisis deduktif akan mengacu pada tiga teori utama yang telah diuraikan dalam landasan teori, yaitu ekofeminisme, feminist political ecology (FPE), dan teori kebijakan publik berperspektif gender, sehingga akan dihasilkan tema-tema awal seperti pengetahuan

berbasis gender, akses dan kontrol, serta kebutuhan praktis dan strategis gender. Sementara itu, analisis induktif akan dilakukan untuk menangkap tema-tema emergen yang muncul dari data lapangan yang tidak tercakup dalam kerangka teori awal. Proses analisis akan dibantu dengan penggunaan perangkat lunak NVivo untuk mengorganisasi, mengkode, dan mencari pola dalam data kualitatif yang terkumpul. Analisis dokumen kebijakan akan menggunakan teknik analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) untuk mengungkap bagaimana wacana gender dikonstruksi, direproduksi, dan atau dilawan dalam teks-teks kebijakan lingkungan.

3.4. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan empat kriteria menurut Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas (*Credibility*), transferabilitas (*Transferability*), dependabilitas (*Dependability*), dan konfirmabilitas (*Confirmability*). Kredibilitas data akan ditingkatkan melalui perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, triangulasi sumber dan metode, serta member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, FGD, dan analisis dokumen. Member checking akan dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali temuan kepada partisipan untuk memastikan tidak ada kesalahan interpretasi. Transferabilitas akan diupayakan dengan menyediakan deskripsi yang rinci dan mendalam tentang konteks penelitian sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan dapat ditransfer ke konteks lain. Dependabilitas dan konfirmabilitas akan dijaga melalui audit trail yang terdokumentasi dengan baik, termasuk rekaman wawancara, transkrip, catatan lapangan, dan kode-kode analisis. Penelitian ini juga akan memperhatikan aspek etika penelitian, seperti mendapatkan informed consent dari seluruh partisipan, menjamin kerahasiaan identitas, serta memberikan kebebasan kepada partisipan untuk mengundurkan diri sewaktu waktu tanpa konsekuensi negatif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 54 partisipan yang terdiri dari aktivis lingkungan perempuan (n=12), akademisi (n=9), petani perempuan (n=14), nelayan perempuan (n=5), pengelola sampah perempuan (n=8), serta pejabat perempuan di dinas lingkungan

hidup (n=6) dari tiga lokasi penelitian: Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah karakteristik partisipan penelitian:

Tabel 1. Karakteristik Partisipan Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Lokasi	Jawa Barat	18	33,3
	Kalimantan Timur	17	31,5
	Nusa Tenggara Timur	19	35,2
Usia	20-35 tahun	16	29,6
	36-50 tahun	27	50,0
	>50 tahun	11	20,4
Pendidikan	SD/SMP	19	35,2
	SMA/SMK	22	40,7
	Diploma/S1/S2	13	24,1
Pekerjaan	Petani	14	25,9
	Nelayan	5	9,3
	Pengelola sampah	8	14,8
	Aktivis LSM	12	22,2
	Akademisi	9	16,7
	Pejabat pemerintah	6	11,1

Sumber: Data primer, 2026

Penelitian ini mengungkapkan empat temuan utama yang disajikan secara sistematis sebagai berikut.

Temuan 1: Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Perempuan terhadap Kebijakan Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan memiliki pengetahuan ekologis yang tinggi namun tingkat pengetahuan mereka terhadap kebijakan lingkungan formal masih rendah. Tabel 2 menyajikan distribusi tingkat pengetahuan partisipan.

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Perempuan tentang Lingkungan dan Kebijakan

Indikator Pengetahuan	Tinggi (%)	Sedang (%)	Rendah (%)
Pengetahuan tentang kondisi lingkungan lokal	74,1	20,4	5,5
Pengetahuan tentang dampak perubahan iklim	63,0	27,8	9,2
Pengetahuan tentang strategi adaptasi lingkungan	68,5	24,1	7,4
Pengetahuan tentang kebijakan lingkungan nasional	13,0	25,9	61,1
Pengetahuan tentang mekanisme partisipasi publik	9,3	24,1	66,6
Pengetahuan tentang hak-hak perempuan dalam kebijakan	7,4	20,4	72,2

Sumber: Data primer, 2026

Berdasarkan analisis wawancara mendalam, di Nusa Tenggara Timur, para perempuan petani dan pengelola sumber daya air mampu mengidentifikasi secara akurat perubahan pola musim, penurunan debit mata air, serta strategi adaptasi terhadap kekeringan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di Kalimantan Timur, perempuan dari komunitas Dayak memiliki pengetahuan tentang keanekaragaman hayati hutan, termasuk tanaman obat dan indikator ekologis yang menandakan gangguan hutan. Di Jawa Barat, para perempuan pengelola sampah di bank sampah komunitas menunjukkan pemahaman yang rinci tentang jenis sampah, siklus daur ulang, serta nilai ekonomi dari pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Namun demikian, pengetahuan dan perspektif ini hampir tidak pernah terdokumentasi dalam dokumen kebijakan lingkungan formal.

Temuan 2: Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Lingkungan, Penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai tahapan kebijakan lingkungan masih sangat rendah. Tabel 3 menyajikan data tingkat partisipasi berdasarkan tahapan kebijakan.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Tahapan Kebijakan Lingkungan

Tahapan Kebijakan	Pernah Terlibat (%)	Tidak Pernah Terlibat (%)	Keterangan
Perumusan masalah (identifikasi isu)	14,8	85,2	Partisipasi paling rendah
Penyusunan rancangan kebijakan	7,4	92,6	Hanya di tingkat komunitas
Konsultasi publik/ Musrenbang	24,1	75,9	Mayoritas hanya sebagai pendengar
Implementasi kebijakan	42,6	57,4	Terbatas pada level operasional
Monitoring dan evaluasi	11,1	88,9	Sangat terbatas
Advokasi dan revisi kebijakan	5,6	94,4	Hanya dilakukan aktivis terorganisir

Sumber: Data primer, 2026

Tabel 3 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tertinggi terjadi pada tahap implementasi kebijakan (42,6%), terutama dalam kegiatan operasional seperti pengelolaan bank sampah, penanaman pohon, dan pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas. Namun, partisipasi pada tahap perumusan masalah (14,8%), penyusunan rancangan kebijakan (7,4%), dan advokasi kebijakan (5,6%) masih sangat rendah. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum kebijakan lainnya, dan ketika mereka hadir, suara mereka seringkali tidak didengarkan. Seorang informan dari Kalimantan Timur mengungkapkan, "Kami tahu persis pohon mana yang harus dijaga dan mana yang boleh ditebang, tapi ketika rapat di kecamatan, kami hanya disuruh duduk di belakang dan mendengarkan."

Temuan 3: Analisis Dokumen Kebijakan Lingkungan, Analisis dokumen kebijakan lingkungan di tingkat nasional dan daerah mengungkapkan bahwa secara normatif kebijakan lingkungan di Indonesia telah mengakui pentingnya partisipasi perempuan, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dan implementasi operasional. Tabel 4 menyajikan hasil analisis konten terhadap enam dokumen kebijakan utama.

Tabel 4. Hasil Analisis Konten Dokumen Kebijakan Lingkungan

Dokumen Kebijakan	Level	Penyebutan Gender/ Perempuan	Mekanisme Operasional	Indikator Terukur	Alokasi Anggaran
UU No. 32/2009 PPLH	Nasional	Ada (normatif)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
PermenLHK Partisipasi Publik	Nasional	Ada (umum)	Tidak spesifik gender	Kuantitatif (jumlah peserta)	Tidak ada
Perpres Pengarusutamaan Gender	Nasional	Ada (komprehensif)	Ada (umum)	Ada (umum)	Tidak spesifik
RPJMN Bidang Lingkungan	Nasional	Ada (simbolis)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Perda Lingkungan Jawa Barat	Provinsi	Ada (normatif)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Perda Lingkungan Kaltim & NTT	Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Analisis dokumen, 2026

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa masyarakat, termasuk perempuan, berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Kebijakan Strategis Nasional tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) juga secara eksplisit mencantumkan lingkungan hidup sebagai salah satu sektor prioritas. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan normatif tersebut tidak diikuti dengan mekanisme operasional yang konkret. Di tingkat daerah, dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup di ketiga lokasi penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender lebih bersifat simbolis, hanya tercantum dalam kata pengantar atau pernyataan umum, tanpa target yang terukur, indikator kinerja, maupun alokasi anggaran khusus.

Temuan 4: Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Perempuan, Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat dan mendukung partisipasi

perempuan dalam kebijakan lingkungan. Tabel 5 menyajikan faktor-faktor tersebut berdasarkan frekuensi penyebutan oleh partisipan.

Tabel 5. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Perempuan

No	Faktor Penghambat	Frekuensi (%)	No	Faktor Pendukung	Frekuensi (%)
1	Norma patriarkal/budaya	88,9	1	Dukungan organisasi perempuan	72,2
2	Tidak ada kebijakan afirmatif	83,3	2	Keberadaan tokoh perempuan lokal	66,7
3	Waktu pertemuan tidak ramah gender	79,6	3	Pendampingan LSM	63,0
4	Lokasi pertemuan sulit dijangkau	74,1	4	Penggunaan media sosial/teknologi	55,6
5	Kurangnya kepercayaan diri	70,4	5	Pendidikan dan pelatihan	51,9
6	Kemampuan aparatur rendah	66,7	6	Akses informasi yang memadai	46,3
7	Beban ganda (domestik)	63,0	7	Dukungan keluarga	44,4
8	Kurangnya akses informasi	59,3	8	Adanya kebijakan afirmatif lokal	38,9

Sumber: Data primer, 2026 (persentase berdasarkan 54 partisipan)

Faktor penghambat paling dominan adalah faktor struktural dan kultural yang saling memperkuat. Pada tingkat struktural, tidak adanya kebijakan afirmatif yang mengharuskan kuota keterwakilan perempuan (83,3%) dan waktu pertemuan yang tidak ramah gender (79,6%) menjadi hambatan utama. Pada tingkat kultural, norma patriarkal (88,9%) dan kurangnya kepercayaan diri perempuan (70,4%) menjadi faktor yang paling sering disebutkan. Sementara itu, faktor pendukung utama meliputi dukungan organisasi perempuan (72,2%), keberadaan tokoh perempuan lokal (66,7%), dan pendampingan LSM (63,0%).

4.2. Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat argumen ekofeminisme bahwa terdapat hubungan konseptual antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam. Dalam konteks kebijakan lingkungan di Indonesia, logika dominasi patriarkal yang hierarkis dan dualistik tercermin dalam bagaimana proses kebijakan meminggirkan pengetahuan ekologis perempuan sebagai sesuatu yang dianggap tradisional, tidak ilmiah, dan kurang penting dibandingkan dengan pengetahuan teknokratis yang didominasi laki-laki. Pengetahuan lokal perempuan tentang perubahan musim, pengelolaan air, keanekaragaman hayati, maupun pengelolaan sampah, yang terbukti empiris (74,1% memiliki pengetahuan lingkungan lokal tinggi) dan berbasis pengalaman langsung, didevaluasi dalam forum-forum kebijakan. Fenomena ini dalam perspektif ekofeminisme merupakan wujud dari "epistemic injustice" (ketidakadilan epistemik), dimana sistem pengetahuan yang dianggap sah (legitimate knowledge) dalam kebijakan publik hanya pengetahuan yang diproduksi oleh lembaga-lembaga formal yang dikendalikan laki-laki, sementara pengetahuan yang berasal dari pengalaman perempuan dianggap tidak relevan meskipun secara faktual lebih akurat dan kontekstual.

Tabel 6. Perbandingan Pengetahuan Perempuan vs Pengetahuan Teknokratis dalam Kebijakan

Aspek	Pengetahuan Perempuan	Pengetahuan Teknokratis	Status dalam Kebijakan
Sumber	Pengalaman langsung lapangan	Studi/penelitian formal	Teknokratis lebih dominan
Metode	Observasi, turun-temurun	Kuantitatif, statistik	Teknokratis lebih dihargai
Cakupan	Mikro/lokal	Makro/nasional	Tidak terintegrasi
Bahasa	Naratif, kontekstual	Teknis, universal	Teknokratis dianggap "ilmiah"
Validitas	Empiris, teruji waktu	Statistik, teruji laboratorium	Teknokratis dianggap lebih valid

Sumber: Analisis peneliti, 2026

Perspektif Feminist Political Ecology (FPE) memberikan kerangka analitis yang lebih tajam untuk memahami temuan-temuan empiris penelitian ini. FPE menekankan bahwa akses, kontrol, dan pengetahuan tentang sumber daya alam sangat ditentukan oleh

relasi gender yang bersifat dinamis dan kontekstual. Temuan bahwa partisipasi perempuan hanya tinggi pada tahap implementasi (42,6%) namun sangat rendah pada tahap perumusan masalah (14,8%) dan advokasi kebijakan (5,6%) mengonfirmasi adanya ketimpangan akses dan kontrol. Perempuan di ketiga lokasi penelitian memiliki akses terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi kontrol terhadap sumber daya tersebut termasuk hak untuk mengambil keputusan tentang pengelolaannya berada di tangan laki-laki. Dalam kerangka FPE, hal ini terjadi karena kebijakan lingkungan seringkali dibangun di atas asumsi netralitas gender yang keliru, tanpa menyadari bahwa akses dan kontrol terhadap lingkungan sudah terstruktur secara gender sebelumnya. Akibatnya, kebijakan yang tidak secara eksplisit mengintervensi ketimpangan ini justru memperkuat status quo.

Dalam perspektif teori kebijakan publik berperspektif gender, temuan penelitian ini mengonfirmasi adanya kesenjangan yang lebar antara konsepsi normatif pengarusutamaan gender dan implementasinya. Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 6 dokumen kebijakan yang dianalisis, semuanya tidak memiliki mekanisme operasional, indikator terukur, maupun alokasi anggaran yang spesifik untuk mengakomodasi perspektif perempuan. Akibatnya, kebutuhan praktis gender seperti kemudahan akses perempuan terhadap forum kebijakan, penyediaan sarana transportasi, atau penyesuaian waktu pertemuan dengan tanggung jawab domestik perempuan, belum terakomodasi. Sementara itu, kebutuhan strategis gender seperti transformasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan bahkan tidak pernah menjadi pertimbangan.

Tabel 7. Kesenjangan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Lingkungan

Dimensi	Target Normatif	Realitas di Lapangan	Kesenjangan
Kelembagaan	Unit PUG aktif di semua dinas	Unit PUG tidak berfungsi	Tinggi
SDM	Semua aparatur terlatih gender	<20% aparatur terlatih	Tinggi
Anggaran	Minimal 5% untuk program gender	0-1% (tidak spesifik)	Tinggi
Partisipasi	Keterwakilan perempuan minimal 30%	<15% di forum kebijakan	Tinggi

Dimensi	Target Normatif	Realitas di Lapangan	Kesenjangan
Monitoring	Indikator gender terukur	Tidak ada indikator	Sangat Tinggi

Sumber: Analisis peneliti, 2026

Konvergensi antara hambatan struktural dan kultural (Tabel 5) menegaskan bahwa transformasi kebijakan lingkungan yang berkeadilan gender tidak dapat dicapai hanya dengan perubahan regulasi, tetapi membutuhkan perubahan budaya politik yang lebih fundamental. Faktor kultural seperti norma patriarkal (88,9%) tidak dapat diubah dengan satu undang-undang. Diperlukan pendekatan multi-tahap dan multi-pihak yang menggabungkan advokasi kebijakan, pemberdayaan kapasitas bagi perempuan, serta pendidikan publik dan kampanye kesadaran untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif. Peran organisasi masyarakat sipil menjadi sangat strategis sebagaimana ditunjukkan oleh faktor pendukung utama: dukungan organisasi perempuan (72,2%) dan pendampingan LSM (63,0%).

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, penelitian ini merekomendasikan model partisipasi perempuan yang ideal dalam kebijakan lingkungan, yang disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Model Partisipasi Perempuan yang Ideal dalam Kebijakan Lingkungan

Tahapan Kebijakan	Bentuk Partisipasi Ideal	Indikator Keberhasilan	Pihak yang Bertanggung Jawab
Perumusan masalah	Identifikasi isu berbasis komunitas	Minimal 40% peserta perempuan	Pemda, LSM, komunitas
Penyusunan kebijakan	Perwakilan perempuan dalam tim perumus	Kuota minimal 30%	DPR, Eksekutif
Konsultasi publik	FGD dan musrenbang sensitif gender	Ruang berbicara setara; penyesuaian waktu/lokasi	Pemda, Bappeda
Implementasi	Pengarusutamaan gender dalam program	Anggaran afirmatif minimal 5%	Seluruh pemangku kepentingan
Monitoring & evaluasi	Tim monitoring dengan keterwakilan perempuan	Indikator gender terukur	Inspektorat, DPR, civil society

Sumber: Rekomendasi penelitian, 2026

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif perempuan secara nyata absen (tidak hadir) dalam kebijakan lingkungan di Indonesia, baik pada tataran substansi dokumen kebijakan maupun dalam proses perumusan dan implementasinya. Ketidakhadiran ini bersifat sistemik dan multidimensional, bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cerminan dari struktur relasi kuasa yang patriarkal dan sistem pengetahuan yang timpang gender.

- a. Pada tataran substansi kebijakan, analisis terhadap enam dokumen kebijakan lingkungan nasional dan daerah menunjukkan bahwa tidak ada satupun kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif, pengalaman, atau kebutuhan spesifik perempuan. Meskipun beberapa dokumen menyebut kata "perempuan" atau "gender" secara normatif, penyebutan tersebut bersifat simbolis dan tidak diikuti dengan operasionalisasi yang konkret. Tidak ada indikator terukur, mekanisme pelaksanaan, maupun alokasi anggaran yang memastikan bahwa perspektif perempuan benar-benar hadir dalam kebijakan. Dengan kata lain, perempuan hadir sebagai kata dalam dokumen, tetapi absen sebagai substansi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan lingkungan yang dihasilkan bersifat "buta gender" (*Gender-Blind*) dan mereproduksi asumsi bahwa kebutuhan laki-laki adalah universal, sementara kebutuhan perempuan dianggap khusus dan tidak penting.
- b. Pada tataran proses kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa ketidakhadiran perspektif perempuan bukan disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakinginan perempuan untuk berpartisipasi, melainkan karena adanya hambatan struktural dan kultural yang secara sistematis mengeluarkan perempuan dari ruang-ruang pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan dalam forum-forum kebijakan seperti musrenbang masih sangat rendah (kurang dari 15% peserta), dan ketika perempuan hadir, suara mereka seringkali tidak didengarkan, pendapat mereka dikesampingkan, atau pengetahuan mereka didevaluasi karena dianggap tidak ilmiah. Dengan demikian, ketidakhadiran perspektif perempuan bersifat "paksaan struktural" (*Structural Exclusion*), bukan pilihan sukarela. Perempuan tidak "memilih" untuk absen, tetapi "dibuat absen" oleh sistem yang tidak ramah terhadap kehadiran mereka.

- c. Ketidakhadiran perspektif perempuan dalam kebijakan lingkungan berdampak serius baik terhadap keadilan gender maupun terhadap efektivitas kebijakan lingkungan itu sendiri. Dari perspektif keadilan gender, ketidakhadiran ini merupakan bentuk diskriminasi struktural yang melanggar hak-hak konstitusional perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati manfaat pembangunan secara setara. Dari perspektif efektivitas kebijakan, ketidakhadiran perspektif perempuan menyebabkan kebijakan lingkungan kehilangan informasi penting tentang kondisi ekologis lokal, strategi adaptasi berbasis komunitas, dan kearifan lokal yang telah teruji secara empiris selama bergenerasi. Dengan kata lain, kebijakan lingkungan menjadi tidak hanya tidak adil tetapi juga tidak efektif karena mengabaikan setengah dari populasinya dan pengetahuan yang mereka miliki.
- d. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketidakhadiran perspektif perempuan dalam kebijakan lingkungan di Indonesia diperkuat oleh tiga mekanisme utama: (1) mekanisme epistemik, yaitu devaluasi sistematis terhadap pengetahuan perempuan yang dianggap "tradisional" dan "tidak ilmiah"; (2) mekanisme institusional, yaitu tidak adanya aturan afirmatif yang menjamin keterwakilan dan partisipasi substantif perempuan dalam setiap tahapan kebijakan; dan (3) mekanisme kultural, yaitu norma sosial patriarkal yang masih menganggap bahwa urusan publik, termasuk kebijakan lingkungan, adalah domain laki-laki. Ketiga mekanisme ini bekerja secara sinergis dan sirkular, menciptakan lingkaran setan (*Vicious Circle*) yang terus mereproduksi ketidakhadiran perempuan dari generasi ke generasi.
- e. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan bahwa upaya menghadirkan perspektif perempuan dalam kebijakan lingkungan tidak cukup hanya dengan pelatihan atau sosialisasi, tetapi membutuhkan intervensi struktural yang fundamental. Intervensi tersebut meliputi: (1) revisi seluruh regulasi lingkungan untuk memasukkan mekanisme afirmatif yang menjamin keterwakilan perempuan minimal 30% dalam setiap forum kebijakan, disertai dengan sanksi bagi lembaga yang tidak mematuhi; (2) pengembangan standar prosedur operasional partisipasi publik yang sensitif gender, termasuk penyesuaian waktu dan lokasi pertemuan, penyediaan fasilitas ramah perempuan, serta jaminan ruang berbicara yang setara; (3) alokasi anggaran afirmatif minimal 10% dari total anggaran lingkungan untuk

program pemberdayaan perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan gender; (4) reformasi sistem rekrutmen dan promosi di lembaga lingkungan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambil keputusan; serta (5) kampanye nasional untuk mengubah norma sosial patriarkal yang menjadi akar penyebab ketidakhadiran perspektif perempuan. Tanpa intervensi multilevel dan multisistem ini, perspektif perempuan akan terus absen dari kebijakan lingkungan Indonesia, dan ketidakhadiran ini akan terus merugikan baik perempuan itu sendiri maupun upaya pelestarian lingkungan secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Ain, N. Q. dan Khasanah, N. (2025) “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan: Analisis Peran Sekolah dalam Membangun Keadilan Sosial”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2). Tersedia pada: <https://jurnalal-ikhlas.com/PPAI/article/view/217> (Diakses: 27 Desember 2025).
- Anggara, R. and Pribadi, U. (2024) 'Community Participation in Village Deliberations: Examining the Dynamics of Influencing Factors', *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Sosial Humaniora (JPPSH)*, 8(1), pp. 85-95.
- Ayuristian, I. S., & Nusanto, B. (2025). Analisis dinamika dan perspektif gender studi kasus keterwakilan perempuan pilihan legislatif tahun 2024 di DPRD Kab. Lumajang. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 9(4), 1-7.
- Cut Hilwa Maretha, Divana Salsabila Muklis, Alisya Tabina, Najwa and Mutiara Agis Sarita (2025) “Perspektif dan Narasi Perempuan Mengenai Peran dalam Peningkatan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja: Studi Kasus dalam Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), pp. 269–278. doi: 10.31004/jerkin.v4i1.1574.
- Fatikha, N.T. and Permatasari, A. (2023) 'Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), pp. 145-156.
- Firnanda, A. (2025) “Narasi Alam Dan Perempuan Dalam Cerpen Pilihan Kompas Edisi 2025”, *Alinea: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 5(3), pp. 760–774. doi: 10.58218/alinea.v5i3.1828.
- Hemingway, R., Riyanto, S. and Dinakaramani, S. (2024) 'Early Detection of Mental Health Problems in the Family: A Case Study of PRA Tirtonimrolo Selatan Bantul Yogyakarta', in *Proceedings of the International Conference on Community Service (ICCS) 2024*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ismalia, D., Ariwidodo, B. D. dan Yuniningsih, T. (2025) “Dinamika Ketidaksetaraan Gender dalam Karier: Perspektif Hukum, Budaya, dan Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Seminar Nasional dan Call For Paper 2025 dengan tema "Inovasi Inklusif Gender dalam Sociopreneurship" PSGESI LPPM UWP*, 12(1), hlm. 80–88. doi: 10.38156/gesi.v12i1.446.
- Kelibay, I., Nashir, H., Al-Hamdi, R. and Banggu, M. (2025) 'The Transformation of the Partai Keadilan Sejahtera: Inclusivity in Indonesia's Multicultural Politics',

- Mawazih: *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 16(1), pp. 110-130. doi: 10.32923/yx5c4d84.
- Latifah, & Wiyatmi. (2025). Analisis ecofeminisme dalam layar lebar: Mengurai ketidakadilan gender dan lingkungan melalui film *Sexy Killers*. *Aksara*, 37(1), 169-184. doi: <http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v37i1.4786>.169-184.
- Manulu, L., & Armansyah. (2025). Afirmasi regulasi perlindungan dan keterlibatan perempuan dalam lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan. *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(3), 51-65.
- Muttaqin, M.I. and Permatasari, A. (2023) 'Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023', *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), pp. 187-201. doi: 10.14710/jiip.v8i2.18875.
- Natali Purwanti, Riri Anggraini and Sarmuli (2025) "Pandangan Studi Gender Terhadap Pelecehan Seksual Kaum Perempuan di Palangka Raya", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), pp. 1420–1426. doi:10.63822/xe5mq468.
- Nurinaya, & Siswatinigrum, E. (2025). Signifikansi peran perempuan adat Papua dalam upaya iklim berkelanjutan. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(2), 21-37.
- Permatasari, A. and Walinegoro, B.G. (2023) Tata Kelola Kolaboratif dalam Mewujudkan Smart Society sebagai Upaya Berkelanjutan Penurunan Stunting. Sleman: The Journal Publishing.
- Permatasari, A. and Walinegoro, B.G. (2023) 'Collaborative Governance in Realizing a Smart Society for Sustainable Stunting Reduction in Sleman Regency', *E3S Web of Conferences*, 440, p. 01010. doi: 10.1051/e3sconf/202344001010.
- Rahmanto, F., Purnomo, E.P., Kasiwi, A.N. and Salsabila, L. (2021) 'Women's Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(2), pp. 100-115. Available at: <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/view/22666>.
- Ramadhan, S.A. and Pribadi, U. (2024) 'Analisis Kepuasan Warga terhadap Layanan E-Government: Studi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kota Tangerang', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), pp. 89-101.
- Riyanto, S. and Rochimah, T.H.N. (2024) 'Political Education for Women at Board of Aisyiyah (PCA) Tempel Sleman Yogyakarta', in *Proceedings of the International Conference on Communication Science (ICCS) 2024*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riyanto, S., Rochimah, T.H.N. and Wulandari, R. (2024) 'Healthy Food as a Branding Strategy for MSMEs in Rural Areas', in *Proceedings of the International Conference on Community Service (ICCS) 2024*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suhardi, U.U., Pribadi, U. and Losi, Z. (2023) 'The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management', *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), pp. 1050–1060. doi: 10.23887/ijssb.v7i4.57648.
- Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z. and Jubb, H. (2022) 'Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan dan Hak Kewarisan Islam', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(2), pp. 130-137.

- Sulastri, S. and Permatasari, A. (2023) 'Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Transformatif*, 9(2), pp. 185-200.
- Wahyuni, H., Mutiarin, D., Pribadi, U., Ismail, N.S.A., Purnomo, E.P. and Kumorotomo, W. (2024) 'Maturity of data interoperability cross-organizations in supporting the concept of one employment data at the ministry and regional government levels', *Cogent Social Sciences*, 10(1), p. 2407936. doi: 10.1080/23311886.2024.2407936.
- Wati, E. T. and Ayu Sejati, M. (2025) "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan di Indonesia", *Geomedia Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 23(2), pp. 29–40. doi: 10.21831/gm.v23i2.88546.
- Winarsih, A.S. (2025) 'The Effect of Social Assistance Programs using Cash Conditional Transfer on Environmental Resilience in Vulnerable Communities', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1475(1), p. 012031. doi: 10.1088/1755-1315/1475/1/012031.
- Winarsih, A.S. and Kencono, D.S. (2022) 'Penerapan Jogja Smart Service dalam Pengaplikasian Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Kota Yogyakarta', *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1). doi: 10.18196/ppm.511007.
- Winarsih, A.S. and Kencono, D.S. (2025) 'Navigating Urbanization and Sustainability: Lessons from Jogjakarta's Green Public Space', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1566(1), p. 012024. doi: 10.1088/1755-1315/1566/1/012024.
- Winarsih, A.S., Kencono, D.S., Yecyec, F.L.M. and Kasiwi, A.N. (2026) 'Inclusive Communication in Public Service Innovation "Si Nduk KEREN" as Media for Civic Engagement in Pacitan Regency', *Jurnal Audiens*, 7(1), pp. 19–31. doi: 10.18196/jas.v7i1.742.
- Winarsih, A.S., Ratmito and Valmoria, J.J.Y. (2023) 'Smart Monitoring and Inclusivity in the Social Assistance Application', in *E3S Web of Conferences: ICENSO 2023*. doi: 10.1051/e3sconf/202344001009.